

Motivasi Indonesia menandatangani *Preferential Trade Agreement* (PTA) dengan
Pakistan Tahun 2012

Oleh: Khairul Hafiz

Pembimbing: Afrizal, S.IP, MA

Bibliografi: 1 Buku, 6 Surat Kabar Elektronik, 8 Website

ABSTRACT

This study analyzes the factors that motivate Indonesia signed a preferential trade agreement with Pakistan in 2012 . the reasons which prompted Indonesia to cooperate with Pakistan to better cooperation , free trade agreements . This study will also explain the Indonesian trip begins negotiations of the Framework on Comprehensive Economic Partnership (FACEP) by Indonesia and Pakistan signed in 2005 , both from the development and scope of negotiations .

Keywords: Preferential Trade Agreement, Cooperation, Factors.

Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.¹

Liberalisasi perdagangan dan investasi yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi antar bangsa menuntut antisipasi yang cepat oleh setiap negara agar mampu bersaing dengan negara lain dalam bidang tersebut, baik dalam forum regional maupun internasional, seperti APEC, AFTA, dan WTO. Sementara itu, perwujudan era perdagangan bebas global (*global free trade*), pada satu sisi, telah menjadi obsesi bagi sebagian negara, terutama negara negara industri/maju. Sebaliknya, bagi sebagian negara lainnya, terutama negara negara yang keadaan ekonominya lemah, perdagangan bebas menjadi ancaman yang serius yang dapat semakin melemahkan keadaan dan kemampuan ekonominya. Namun demikian, mau tidak mau, cepat atau lambat, kelompok negara yang terakhir ini harus ikut dalam proses perdagangan bebas tersebut.²

¹ Muhammad Sood, "*Hukum Perdagangan Internasional*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

² Visi Indonesia 2020.

<http://www.bappenas.go.id/files/3413/5228/2960/visi2002__20090929140041__2080__11.pdf>, diakses tanggal 31 Maret 2013

Indonesia menjadi anggota WTO sejak tanggal 1 Januari 1995. Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization/WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang membawa konsekuensi baik eksternal maupun internal. Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO. Hal ini sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan iktikad baik). Konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO. Artinya dalam melakukan harmonisasi, Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional namun tidak melanggar rambu rambu ketentuan WTO.³ Indonesia merupakan salah satu negara berkembang anggota WTO dan penerapan prinsip preferensi bagi negara berkembang juga diperoleh oleh Indonesia. Salah satu manfaat dari penerapan prinsip ini yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia adalah dengan diterapkannya GSP (*the Generalized System of Preferences/Sistem Preferensi Umum*) dalam keberhasilan Indonesia untuk meningkatkan ekspornya, terutama dalam ekspor nonmigas. Pemberian GSP terhadap Indonesia ini diberikan hanya untuk produk nonmigas saja dan tidak berlaku untuk produk migas.⁴

Pemberian GSP ini dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke luar negeri. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu negara berkembang memperluas ekonomi mereka dengan mengizinkan barang-barang tertentu yang akan diimpor ke negara maju mendapatkan fasilitas bebas bea masuk. Pemberian GSP ini tidak diberikan tanpa syarat, ada ketentuan yang harus dilaksanakan oleh negara berkembang untuk memperoleh GSP tersebut. Aturan main pemberian GSP oleh negara maju, antara satu negara dengan negara lainnya sangat berbeda. Namun, secara prinsip pemberian fasilitas ini senantiasa didasarkan kepada pasal-pasal mengenai pemberian preferensi yang terdapat di dalam perjanjian perdagangan internasional GATT dan WTO.

Indonesia mengalami kendala dalam pelaksanaan prinsip preferensi sebagai negara berkembang, kendala yang dihadapi Indonesia merupakan kendala dalam pelaksanaan GSP tersebut. Pemanfaatan fasilitas GSP yang diberikan oleh negara maju tidak termaksimalkan secara maksimal oleh eksportir Indonesia. Pertama, hal ini dapat terjadi karena tidak semua produk yang diberikan GSP adalah produk ekspor non migas Indonesia. Kedua, karena ketidaktahuan para eksportir Indonesia tentang fasilitas GSP karena kurangnya informasi dari pemerintah atau memang keengganan dari eksportir Indonesia untuk masuk pasar negara maju pemberi GSP karena kekhawatiran kalah bersaing walau ada fasilitas GSP atau eksportir kita yang hanya berani untuk memasarkan produknya di dalam

³ Muhammad Sood, *op., cit.*, hal. 13.

⁴ Muhammad Sood, *op., cit.*, hal. 272.

negeri saja.⁵ Selain itu adanya batas waktu (jangka waktu) pemberian GSP. Apabila jangka waktu GSP ini telah berakhir, maka untuk melakukan perpanjangan dalam perjanjian GSP ini dibutuhkan waktu yang lama dalam melakukan perundingan dengan negara pemberi GSP. Pemberian GSP ini bukan semata-mata ditujukan untuk pengembangan ekonomi semata. Akan tetapi, lebih bernuansa politik sebagai salah satu cara guna menekan negara-negara berkembang agar mengikuti kebijakan dari negara-negara maju. Dengan demikian, GSP tersebut dapat dicabut apabila negara-negara penerima GSP tidak melaksanakan kepentingan negara maju (pemberi GSP), terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tidak mendukung demokrasi sosial, mengabaikan lingkungan hidup (tidak pro-lingkungan hidup), dan sebagainya.⁶

Dalam perkembangannya, tata cara pemberian GSP oleh negara maju kepada negara penerima GSP selalu berubah-ubah menurut kebutuhan, sering kali didapati bahwa perubahan-perubahan tersebut cenderung makin memperkecil ruang lingkup preferensi yang sudah dinikmati oleh pengusaha pengguna GSP atau malah dihapuskan preferensi tersebut. Karena GSP pada hakikatnya adalah pemberian preferensi dari satu negara ke negara lain maka sebagian besar dari perubahan tata cara maupun skema GSP yang diberikan tidak dilakukan perundingan untuk adanya suatu perubahan. Sistem preferensi umum yang diberikan negara maju secara unilateral dapat ditarik sewaktu-waktu sehingga posisi negara berkembang sangat lemah.⁷

Melihat hal ini, Indonesia bergerak cepat untuk melakukan sistem preferensi perdagangan ini lagi namun dengan negara yang selevel dengannya (berkembang) yaitu negara Pakistan, yang mana pada 24 November 2005 Indonesia dan Pakistan menandatangani *Framework on Comprehensive Economic Partnership* (FACEP) di sela-sela kunjungan Presiden Indonesia ke Pakistan. Menurut ketentuan FACEP, kedua negara setuju untuk memulai negosiasi *Preferential Trade Agreement* (PTA) sebagai langkah awal dalam mencapai kesepakatan *Free Trade Agreement* (FTA) yang menjadi tujuan akhirnya dan untuk mengimplementasikan FACEP, Menteri Perdagangan setuju untuk mendirikan *Trade Negotiation Committee* (TNC).⁸

⁵ GSP UE dan Manfaatnya Bagi Indonesia. <http://www.indonesianmission-eu.org/website/page309696063200309054484127.asp>, diakses tanggal 31 Maret 2013.

⁶ Muhammad Sood, *op. cit.*, hal. 43

⁷ *Ibid*, hal. 272

⁸ RI dongkrak jualan ke Pakistan, dari <<http://jaringnews.com/ekonomi/umum/9292/kini-saat-ri-dongkrak-jualan-ke-pakistan>> , di akses pada tanggal 006C 26 Maret 2013.

Pembahasan

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947, pada Artikel 24 Paragraph 4 menyebutkan: “*The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of trade by the development, through voluntary agreements, of closer integration between the economies of the countries parties to such agreements. They also recognize that the purpose of a customs union or of a free trade area should be to facilitate trade between the constituent territories and not to raise barriers to the trade of other contracting parties with such territories*”.

Berdasarkan artikel di atas, anggota *World Trade Organization* (WTO) diberikan keleluasaan untuk membentuk suatu perjanjian daerah perdagangan bebas dengan negara lain. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip *Most Favoured Nation*. Artinya negara yang menjadi pihak pada *Free Trade Area* boleh saling memberikan perlakuan istimewa, namun tidak dapat meningkatkan hambatan kepada negara anggota WTO lainnya melebihi komitmen yang telah disampaikannya kepada WTO.

Demikian juga halnya dengan Indonesia, untuk meningkatkan perdagangan dengan Pakistan, saat ini sedang dilakukan upaya untuk dapat menyelesaikan perundingan *Preferential Trade Agreement* (PTA). Perundingan PTA yang diusung dengan wahana *Trade Negotiating Committee* (TNC) telah dilakukan beberapa kali.

Perundingan PTA antara Indonesia dan Pakistan dimaksudkan agar:

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kerja sama perekonomian antara kedua negara.
2. Memfasilitasi aktivitas pelaku usaha Indonesia-Pakistan.
3. Memperluas hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara kedua negara.
4. Memperluas pasar.
5. Mengurangi hambatan perdagangan kedua negara dengan tujuan akhir untuk menciptakan *Free Trade Area* (FTA).

Di dalam Artikel 2 (kedua) dari *Draft Preferential Trade Agreement* yang telah disepakati oleh kedua negara disebutkan bahwa cakupan produk dalam PTA antara Indonesia-Pakistan adalah seperti yang tertuang di dalam Lampiran I dan Lampiran II dalam perjanjian tersebut. Lampiran I adalah daftar produk yang diminta oleh Indonesia kepada Pakistan untuk diturunkan tarifnya dan Lampiran II adalah daftar produk yang diminta Pakistan kepada Indonesia untuk diturunkan tarifnya.

Perundingan *Trade Negotiating Committee* antara Indonesia-Pakistan telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dan pertemuan terakhir dilaksanakan di Bali pada tanggal 29-30 Desember 2009. Perkembangan dari perundingan tersebut, sebagai berikut:

Pada pertemuan TNC pertama kedua belah pihak telah membahas rancangan Teks *Preferential Trade Agreement* yang telah diajukan oleh Pakistan,

dan juga *request list* yang diajukan oleh masing-masing negara dan ketentuan asal barang.

Pada pertemuan kedua, di samping isu yang dibahas pada pertemuan TNC pertama, kedua belah pihak juga mengajukan *request list* untuk disetujui untuk diturunkan tarifnya dalam kerangka *Preferential Trade Agreement* Indonesia-Pakistan.

Pada pertemuan TNC ketiga, isu rancangan teks PTA kembali dirundingkan dan disepakati untuk menambahkan satu pasal tentang definisi. Pembahasan untuk isu lainnya juga telah dilakukan yaitu isu ketentuan asal barang, dan daftar produk yang akan dimasukkan dalam PTA. Pada perundingan untuk isu daftar produk yang akan dimasukkan dalam PTA, kedua negara telah mengajukan *request list*.

Pada pertemuan TNC keempat, isu yang belum disepakati pada TNC ketiga kembali dibahas. Sedangkan pada pertemuan TNC kelima yang dilaksanakan di Islamabad, pada tanggal 17-18 Februari 2009, kedua pihak kembali merundingkan Teks PTA, *Rules of Origin and Operational Certification Procedures*, *Base rate for applying tariff reduction* dan rancangan *Architecture* dari FTA Indonesia- Pakistan.

Pada pertemuan TNC kelima ini, pembahasan *request* dan *offer list* kedua pihak kembali dibahas. Kedua belah pihak mengusulkan untuk mengajukan *request list* tambahan (*request list* baru). Indonesia meminta Pakistan untuk menurunkan beberapa produk yang terkait dengan produk kertas, *sorbitol*, *glycerol*, *formid acid*, *Phthalic Anhydride*, *Teraphtalic Acid*, *ceramic*, dan produk perikanan. Sementara Pakistan meminta agar Indonesia menurunkan tarif lebih besar untuk beberapa produk yang masuk dalam *Pakistan's request list for deeper cut* dan meminta untuk memasukkan kembali beberapa produk yang sebelumnya tidak disetujui oleh pihak Indonesia pada putaran sebelumnya.

Pada pertemuan TNC keenam, pendirian Pakistan yang sangat kuat agar seluruh *request*-nya dipenuhi dan posisi Indonesia yang belum dapat memenuhi permintaan tersebut telah mengakibatkan perundingan belum dapat menghasilkan sebuah keputusan.

Untuk menyelesaikan perundingan PTA yang belum terselesaikan pada TNC keenam, maka kedua pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan TNC ketujuh, dan berdasarkan kesepakatan akan dilaksanakan di Islamabad, Pakistan pada waktu yang ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama.

PTA Indonesia-Pakistan belum dapat diselesaikan mengingat kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan, Pakistan meminta pihak Indonesia untuk memenuhi permintaannya yaitu menurunkan tarif bea masuk jeruk Kino Pakistan menjadi 0% dan produk lainnya yang menjadi *additional request list* Pakistan pada TNC kelima. Sementara itu, Indonesia belum dapat memberikan *offer* seperti yang diminta Pakistan. Demikian juga dengan Indonesia yang meminta produk kertas, sorbitol, keramik, dan perikanan untuk diturunkan tarifnya, belum dapat dipenuhi Indonesia secara keseluruhan.

Melihat keringanan tarif CPO yang didapatkan oleh Malaysia, dengan melakukan FTA Malaysia-Pakistan, maka Indonesia akan tetap melanjutkan TNC ketujuh, yang disepakati dilaksanakan di Islamabad, Pakistan pada waktu yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.⁹

Dan pada hari Jum'at tanggal 16 September 2011 Pemerintah Indonesia dan Pakistan dalam pertemuan *Trade Negotiating Committee* (TNC) ke-8 sepakat untuk menurunkan beberapa pos tarif dalam perdagangan bilateral kedua negara misalnya seperti *crude palm oil*, batu bara, kertas, kapas, tembaga, wol, dan bahan kulit.

Dengan disepakatinya PTA ini, kedua pimpinan delegasi melakukan persetujuan melalui *initialling*. Diharapkan teks PTA dan semua dokumen terkait akan ditandatangani oleh Menteri Perdagangan kedua negara akhir tahun 2011.¹⁰ Dan akhirnya pada tanggal 16 Februari 2012, Duta Besar RI untuk Pakistan telah melaksanakan jamuan makan malam dalam rangka mensyukuri atas telah ditandatanganinya *Preferential Trade Agreement* (PTA) Indonesia-Pakistan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2012 bertempat di Aula Budaya Nusantara KBRI Islamabad.

Pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan dengan Menteri Perdagangan Republik Islam Pakistan, Makhdoom Amin Fahim, pada 21 Nopember 2012 membuahkan hasil. Kedua Menteri sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan di tahun mendatang.

“Kesuksesan dan keefektifan implementasi PTA dapat mendorong peningkatan volume perdagangan bilateral dua kali lipat dalam waktu empat tahun. Kita harus berusaha untuk mencapai target yang jauh lebih tinggi,” kata Menteri Perdagangan.

Pertemuan bilateral digelar di sela-sela *Developing Eight* (D-8) *Organization for Economic Cooperation Summit*, di Islamabad, Pakistan. Isu yang diangkat pada pertemuan bilateral tersebut upaya untuk mengimplementasikan *Preferential Trade Agreement* (PTA) antara Indonesia dan Pakistan secara penuh yang telah ditandatangani di Jakarta pada 3 Februari 2012.¹¹

PTA RI-Pakistan diratifikasi Indonesia pada 20 November 2012 melalui Perpres No. 98/2012 dan efektif berlaku mulai 18 Januari 2013 setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 26/2013 tentang tarif bea masuk dalam rangka PTA RI-Pakistan terbit. RI menawarkan akses pasar bagi Pakistan yang mencakup 221 pos tarif preferensi antara lain seperti buah segar (termasuk jeruk kino),

⁹ Buletin kerjasama perdagangan indonesia pakistan, dari http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buletin%202010/Buletin%20Edisi%20003_2010.pdf diakses pada tanggal 20 Agustus 2013.

¹⁰ Jakarta Pakistan sepakat turunkan cpo, dari <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2011/09/19/jakarta-pakistan-sepakat-turunkan-tarif-bea-masuk-impor-cpo-indonesia-id1-1353754108.pdf> > diakses pada tanggal 10 Juli 2013.

¹¹ Implementasi PTA Indonesia Pakistan, dari <http://jaringnews.com/internasional/asia/28118/indonesia-pakistan-siap-implementasikan-persetujuan-preferensi-perdagangan> > diakses pada tanggal 10 Juli 2013.

benang, bahan katun, pakaian jadi, kipas angin, perlengkapan olah raga (badminton dan raket tenis), barang-barang dari kulit dan produk industri lainnya. Sementara, Pakistan menawarkan akses bagi 287 pos tarif preferensi bagi produk Indonesia, seperti produk CPO (*crude oil, palm stearin, refined bleached deodorised palm oil, palm olein, crude oil of palm kernel*), produk olahan gula, produk kakao dan *consumer goods* (odol, sabun, dan deodoran).¹²

Faktor-faktor yang memotivasi Indonesia menandatangani *Preferential Trade Agreement* dengan Pakistan.

Secara umum, ada beberapa faktor yang mendorong sebuah negara melakukan perdagangan dengan negara lain, diantaranya:

1. Memenuhi barang dan jasa di dalam negeri.
2. Memperluas jangkauan pasar.
3. Tidak meratanya sumber daya alam.
4. Perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Adanya kesamaan selera dan mengonsumsi barang.
6. Dorongan untuk menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain.
7. Terjadinya era globalisasi yang memungkinkan negara tidak dapat hidup sendiri.

Dan secara khusus, hal-hal yang menjadi faktor utama mengapa Indonesia menandatangani *Preferential Trade Agreement* dengan Pakistan bisa dilihat dari banyaknya kesamaan yang ada, peluang atas perjanjian tersebut dan tantangan kedepannya dari perjanjian ini.

Adanya Kesamaan

1. Tidak ingin ketergantungan dari GSP yang diberikan oleh negara maju seperti AS, konsep yang sama seperti GSP pun bisa didapatkan dengan negara yang sama-sama berkembang seperti Pakistan melalui PTA. Walaupun sama-sama negara berkembang bukan berarti keunggulan dari setiap produksi juga sama, keuntungan juga tentu bisa didapat walaupun dengan negara sesama berkembang sekalipun.
2. Pakistan dan Indonesia adalah dua negara sahabat yang sama-sama menangis di kala duka dan sama-sama tertawa di saat bahagia. Gempa bumi di Pakistan akhir 2005 yang menelan korban puluhan ribu jiwa serta gempa dan tsunami di Indonesia (2004) membuat bangsa di kedua negara semakin dekat dan semakin sadar bahwa bangsa Indonesia dan Pakistan senasib dan sepenanggungan dalam semangat saling membantu.
3. Kedekatan hubungan emosional para pemimpin kedua negara telah pula menjadi modal penting dalam mendorong kerja sama dan peningkatan hubungan antarbangsa. Pakistan penting bagi Indonesia. Ini antara lain terlihat

¹² PTA RI Pakistan. <<http://www.bisnis.com/m/pta-ri-pakistan-masih-minim-pemanfaatan-surat-keterangan-asal>> diakses pada tanggal 22 April 2013.

dari adanya Kedutaan Besar RI di Islamabad, Konsulat Jenderal RI di Karachi dan Konsul Kehormatan RI di Lahore. Saat ini, sekitar 100 mahasiswa Indonesia belajar di Pakistan, antara lain di International Islamic University, Islamabad.

4. Sama-sama tergabung di dalam beberapa organisasi seperti Developing 8 (D-8), Next Eleven (N-11), Gerakan Non-Blok (GNB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). D-8 beranggotakan delapan negara berkembang, yaitu Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki. Kedelapan negara ini memiliki kedekatan sebagai sesama negara berpenduduk mayoritas beragama Islam. Potensi kerja sama D-8 ini cukup besar. Menurut Menteri Perdagangan, forum D-8 dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai jembatan untuk mengakses pasar yang terus berkembang, mengingat masih lesunya perekonomian mitra-mitra dagang tradisional, seperti Eropa dan Amerika Utara. Dengan total jumlah penduduk hampir satu miliar jiwa atau sekitar 13% penduduk dunia, D-8 ditaksir memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) hampir mencapai USD 2,5 triliun pada tahun 2012. Indonesia merupakan negara terbesar di D-8, di atas Turki. Namun volume perdagangan Indonesia dengan dunia maupun dengan D-8 masih berada di bawah Malaysia. “Ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk terus meningkatkan volume dan nilai perdagangan dengan negara mitra D-8, sehingga dapat memimpin di kawasan,” kata Mendag menanggapi hal tersebut. Kedua negara adalah anggota perdagangan bilateral antar kedua negara saat ini bernilai \$800 juta, namun berencana meningkatkannya menjadi \$2 miliar.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Pakistan yang sudah terjalin sebelumnya secara umum bersahabat dan tidak ada hal-hal mendasar yang menghambat hubungan baik kedua negara. Hal ini terlihat dari saling dukung antara Indonesia dan Pakistan di forum multilateral maupun regional. Sejauh ini hubungan kedua negara selalu berpegang pada prinsip tidak terpengaruh oleh figur atau partai yang memerintah di negara masing-masing. Perjanjian dan kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, tetap dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya.¹³

Tantangan

Tidak hanya berdasarkan adanya kesamaan yang terlihat atas penandatanganan PTA ini, tetapi terdapat juga beberapa tantangan di dalamnya. Seperti yang akan dialami Jeruk Pontianak dan Medan asal Indonesia yang kini harus bersiap menghadapi persaingan di pasar buah untuk komoditi jeruk. Tak lama lagi jeruk Kinow asal Pakistan bakal hujani pasar buah Indonesia. Pasalnya pemerintah Indonesia telah mengenakan tarif bea masuk nol persen untuk jeruk Kinow asal Pakistan.

Pemberian tarif bea masuk tersebut terdapat dari salah satu pos tarif yang tertuang dalam The Preferential Trade Agreement (PTA). Perjanjian tersebut

¹³ Potensi perdagangan D-8, dari <<http://wartaekonomi.co.id/berita6428/gali-potensi-perdagangan-d8.html>> diakses pada tanggal 10 Juli 2013.

ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan dan Duta Besar Republik Islam Pakistan untuk Indonesia, H.E. Sanaullah, di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta.

Menurut Gita, yang perlu digawis bawah dan yang terpenting bagi Indonesia adalah kita bisa mengirim kelapa sawit dengan lebih besar ke Pakistan. Pasalnya sejak 2008 ekspor kelapa sawit kita ke Pakistan terjun bebas dari USD 550 juta, dimana saat ini ekspor kita kesana hanya tinggal sekitar USD 60 juta.

Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Gusmardi Bustami menambahkan neraca perdagangan Indonesia selama ini selalu surplus terhadap Pakistan. “Faktor yang membuat surplus perdagangan kita yang paling besar dibanding perdagangan lainnya adalah kelapa sawit dibanding komoditi lainnya seperti pinang, gambir, sepatu, kertas, peralatan bangunan,” ujar Gusmardi. Total ekspor ke Pakistan sampai dengan November 2011 sudah mencapai USD 1 miliar lebih. Dan kami optimis dengan adanya penandatanganan PTA ini perdagangan kita akan lebih baik. Sedangkan impor kita dari Pakistan sampai dengan November 2011 hanya 189 juta dollar.¹⁴

Peluang

Saat ini, ekonomi Pakistan terbesar kedua di kawasan Asia Selatan setelah India dan merupakan salah satu pasar negara berkembang di dunia, yang menunjukkan nilai strategis Pakistan bagi Indonesia.

Begitupun sebaliknya, Indonesia adalah anggota penting dari ASEAN dengan ekonomi terbesar dan anggota G20. Akan menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan ekonomi kedua negara dan hubungan perdagangan di kawasan Asia Pasifik.

Di luar keuntungan bilateral, hubungan kuat antara Indonesia dan Pakistan juga memungkinkan kedua negara untuk mendapatkan keuntungan dari optimisme pasar secara keseluruhan dari kawasan Asia. Dan melalui PTA ini peluang untuk Indonesia dan Pakistan dalam konsep perdagangan bebas semakin terbuka lebar tentunya.

Sekilas di atas tadi sempat membahas mengenai pemanfaatan dari salah satu produk keunggulan Indonesia atas PTA ini, yaitu ekspor minyak kelapa sawit. Di sini saya akan mengupas lebih dalam mengenai hal itu.

Peluang Ekspor CPO Indonesia di Pakistan

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang pertumbuhannya paling pesat pada dua dekade terakhir. Pada era tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, industri kelapa sawit berkembang sangat pesat. Pada periode tersebut, areal meningkat dengan laju sekitar 11% per tahun. Sejalan dengan perluasan areal, produksi juga meningkat dengan laju 9,4% per tahun.

¹⁴ Jeruk kinow Pakistan bakal hujani pasar Indonesia, dari <<http://mediaprofesi.com/ekonomi/1092-jeruk-kinow-asal-pakistan-bakal-hujani-pasar-buah-indonesia.html>> diakses pada tanggal 19 September 2013.

Konsumsi domestik dan ekspor juga meningkat pesat dengan laju masing-masing 10% dan 13% per tahun (Direktorat Jenderal Perkebunan 2002). Laju yang demikian pesat menandai era di mana kelapa sawit merupakan salah satu primadona pada sub-sektor perkebunan.¹⁵

Hasil analisis yang dilakukan FAO (2001), Mielke (2001), dan Susila (2002) menunjukkan bahwa prospek CPO di pasar internasional relatif masih cerah. Hal ini antara lain tercermin dari sisi konsumsi yang diperkirakan masih terbuka dengan laju pertumbuhan konsumsi CPO dunia yang diproyeksi kan mencapai sekitar 3,5%-4,5% per tahun sampai dengan tahun 2005. Dengan demikian, konsumsi CPO dunia pada tahun 2005 diproyeksikan mencapai 27,67 juta ton. Untuk jangka panjang, laju peningkatan konsumsi diperkirakan sekitar 3% per tahun.

Peningkatan yang signifikan terutama akan terjadi pada negara yang sedang berkembang seperti di Cina, Pakistan, dan juga Indonesia. Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan konsumsi dengan laju sekitar 4%-6% per tahun. Konsumsi CPO di Cina dan Pakistan diproyeksikan juga akan tumbuh dengan laju sekitar 4-6% per tahun. Sejalan dengan peluang peningkatan konsumsi yang masih terbuka, FAO (2001) menyebutkan bahwa peluang peningkatan produksi sampai dengan 2005 mendatang masih terbuka dengan laju sekitar 4-5% per tahun produksi CPO dunia pada tahun 2005 diperkirakan sekitar 27,68 juta ton.¹⁶

Berdasarkan data *Internasional Trade Statistics* (ITC), pada tahun 2008, untuk pasar India, Indonesia merupakan pengeksportir utama dan diikuti oleh Malaysia, Thailand, Bhutan, dan Singapura. Untuk Pasar China, eksportir utama CPO adalah Malaysia dan diikuti oleh Indonesia, Thailand, dan PNG. Untuk pasar di Belanda, eksportir utama CPO adalah Malaysia dan diikuti oleh Indonesia, PNG, Thailand, dan Kolombia.¹⁷ Eksportir utama CPO ke pasar Pakistan adalah Malaysia dan diikuti oleh Indonesia dan juga Singapura. Pangsa pasar CPO Malaysia tahun 2008 di Pakistan sangat dominan yaitu sebesar 72,6% dan diikuti oleh Indonesia sebesar 26,2% dan Singapura serta negara lainnya sebesar 1,2%.

Ekspor CPO Indonesia ke Pakistan selama lima tahun terakhir (2004 – 2008) mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2004 ekspor CPO Indonesia ke Pakistan sebesar US\$ 28,17 juta, tahun 2005 sebesar US\$ 54,14 juta, tahun 2006 sebesar US\$ 341,34 juta. Tahun 2008 sebesar US\$ 393,67 juta atau turun 39% bila dibandingkan tahun 2007 sebesar US\$ 545,74 juta. Pada tahun 2009 periode Januari-April sebesar US\$ 191,37 juta atau turun 75,46% bila dibandingkan dengan ekspor periode yang sama tahun 2008 sebesar US\$ 46,96 juta.

¹⁵ Wayan R. Susila, *Peluang Investasi pada Rehabilitasi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*, dari
<<http://agrimedia.mb.ipb.ac.id/archive/viewAbstrakArchive?id=c6f737bccf91a2aecb90fa40708aad9b>> diakses pada tanggal 4 Desember 2013.

¹⁶ Wayan R. Susila, *Ibid* diakses pada tanggal 4 Desember 2013.

¹⁷ International Trade Center, *Trade Map*, dari
<http://www.trademap.org/index.aspx?ReturnUrl=%2fCountry_SelProductCountry.aspx> pada tanggal 4 Desember 2013.

Menurut beberapa kajian, penurunan ekspor CPO Indonesia ke Pakistan disebabkan oleh persaingan harga antara Indonesia dan Malaysia. CPO Malaysia mendapat perlakuan istimewa di pasar Pakistan akibat adanya perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*) antara Malaysia dan Pakistan. Pada sebuah seminar yang dilakukan oleh Kedutaan Indonesia di Pakistan, disebutkan bahwa dengan mulai diberlakukannya FTA antara Pakistan dan Malaysia produk CPO Malaysia mendapatkan keringanan tarif 10% lebih kecil dari yang dikenakan terhadap Indonesia. Dampak keringanan tarif yang dinikmati CPO Malaysia tersebut telah menyebabkan *share* impor CPO Indonesia turun menjadi hanya 12,8% sejak Januari-Juni 2009.¹⁸

Nilai ekspor produk sawit dan turunannya ke Pakistan ditaksir bisa mencapai US\$ 1,5 miliar (Rp 15,47 triliun) pada 2014. Angka ini naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2012.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, angka US\$ 1,5 miliar itu dapat dengan mudah dicapai setelah penandatanganan kesepakatan kerja sama perdagangan *Preferential Trade Agreement* (PTA) dengan Pakistan selesai. Bayu meyakini, penandatanganan kerja sama itu akan memberikan keuntungan bagi ekspor produk sawit nasional. Selama ini, Pakistan merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia untuk produk sawit dan turunannya.

Dia mencontohkan, sepanjang 2012, ekspor produk sawit nasional ke Pakistan mencapai US\$ 714 juta. Dengan adanya kerja sama perdagangan dengan Pakistan, ekspor produk sawit Indonesia sepanjang 2013 berpotensi bertambah US\$ 200-300 juta dibandingkan tahun sebelumnya. "Pada tahun 2014 bayangan kita bisa diproyeksikan ekspor komoditas itu ke Pakistan maupun ke negara lain yang melalui Pakistan mencapai US\$ 1,5 miliar, atau dua kali lebih besar daripada potensi 2012".¹⁹

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan sebelumnya mengungkapkan, menjelang Ramadhan tahun ini, permintaan CPO dan turunannya naik cukup signifikan ke Pakistan yang merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim. Volume ekspor ke Pakistan melonjak 150% lebih dari 17,25 ribu ton pada bulan lalu naik menjadi 44,25 ribu ton. Ekspor CPO ke Pakistan saat ini masih rendah, hanya 44.250 ton. Meningkatnya permintaan Pakistan karena jelang hari raya Idul Fitri yang mana konsumsi pangan akan lebih tinggi dari pada bulan biasa.²⁰

Fadhil juga mengungkapkan, harga CPO di pasar dunia masih relatif stagnan. Pada Juni-pertengahan Juli 2013, harga CPO masih berada di kisaran US\$ 835-880 per ton atau naik sangat kecil dibandingkan Mei 2013 yang di kisaran US\$ 828-865 per ton. Pada minggu ketiga Juni 2013 harga CPO naik

¹⁸ Buletin Kerjasama Perdagangan Indonesia Pakistan, dari <http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buletin%202010/Buletin%20Edisi%20003_2010.pdf> diakses pada tanggal 20 Agustus 2013.

¹⁹ Ekspor sawit ke Pakistan, dari <<http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/ekspor-sawit-ke-pakistan-us-15-miliar/40119>> diakses pada tanggal 19 September 2013.

²⁰ Ekspor sawit ke Pakistan, *Ibid* diakses pada tanggal 19 September 2013.

menjadi US\$ 870-880 per ton. Namun demikian, kenaikan tersebut tidak bertahan lama, sebab pada minggu keempat Juni 2013 harga kembali tergerus ke level US\$ 835-855 per ton.²¹

Tidak hanya ekspor CPO saja yang akan diuntungkan dan menjadi peluang atas penandatanganan kerjasama ini tapi masih banyak produk-produk Indonesia yang lainnya, misalnya seperti kertas.

Indonesia sudah kehilangan pasar kertas karton duplex di Pakistan. Sebab, bea masuk impor yang diterapkan di negara itu terlalu tinggi. Bea masuk tersebut dikenakan karena produk kertas dari Indonesia dianggap barang non esensial dan barang mewah. Bea masuk yang dikenakan pada kertas karton duplex dengan HS 4210.9200, awalnya sebesar 25 persen. Pakistan lalu menerapkan bea tambahan yang disebut regulatory duty sebesar 40 persen pada 2009.

"Kertas karton yang masuk Pakistan dikenai bea hingga 51 persen," kata Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, Muhammad Mansur. Belakangan, otoritas perdagangan Pakistan juga mengenakan bea masuk antidumping pada kertas Indonesia sebesar 11 persen. Akibat bea yang terlalu tinggi, ekspor kertas karton duplex Indonesia yang bisa mencapai US\$ 70 juta setahun mulai berkurang pada 2009. "Tapi, tahun lalu, Indonesia sudah tidak ekspor lagi ke Pakistan," ujarnya.

Sebab, importir di Pakistan tidak mau membayar bea sebesar itu. Pengusaha Pakistan lebih memilih produk kertas asal Cina yang bea masuknya lebih murah, yaitu 17 persen. "Karena Cina dan Pakistan sudah punya perjanjian kerjasama perdagangan, Preferential Trade Agreement (PTA)," kata dia.

Mansyur berharap, pemerintah segera menuntaskan perundingan perjanjian kerjasama perdagangan, PTA dengan Pakistan. Sebab, jika perjanjian sudah ditandatangani, bea masuk kertas karton bisa turun di bawah 17 persen. Sehingga produk Indonesia bisa bersaing dengan barang Cina.²²

Simpulan

Selain dari ingin mengurangi ketergantungan GSP dari negara maju, dapat disimpulkan bahwa penandatanganan *Preferential Trade Agreement* (PTA) Indonesia dengan Pakistan dikarenakan banyaknya kesamaan yang dimiliki oleh kedua negara, sehingga mempermudah dalam meningkatkan kerjasama, adanya peluang dalam peningkatan ekspor-ekspor unggulan Indonesia di pasar Pakistan, seperti CPO dan produk unggulan lainnya, produk-produk dari Indonesia dapat bersaing dengan negara lain baik di Pakistan, Indonesiannya sendiri dan dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara khususnya disektor ekonomi dan tentunya sebagai akses menuju bentuk perdagangan yang lebih luas diantara kedua negara, perdagangan bebas (*free trade*).

²¹ Ekspor sawit ke Pakistan, *Ibid* diakses pada tanggal 19 September 2013.

²² Indonesia kehilangan pasar kertas di Pakistan, dari <<http://www.tempo.co/read/news/2011/04/14/090327366/Indonesia-Kehilangan-Pasar-Kertas-di-Pakistan>> diakses pada tanggal 19 September 2013.

Daftar Pustaka

Buku:

Muhammad Sood, "*Hukum Perdagangan Internasional*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Surat Kabar Elektronik:

Ekspor sawit ke Pakistan, dari

<<http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/ekspor-sawit-ke-pakistan-us-15-miliar/40119>> diakses pada tanggal 19 September 2013.

Implementasi PTA Indonesia Pakistan, dari

<<http://jaringnews.com/internasional/asia/28118/indonesia-pakistan-siap-implementasikan-persetujuan-preferensi-perdagangan>> diakses pada tanggal 10 Juli 2013.

Indonesia kehilangan pasar kertas di Pakistan, dari

<<http://www.tempo.co/read/news/2011/04/14/090327366/Indonesia-Kehilangan-Pasar-Kertas-di-Pakistan>> diakses pada tanggal 19 September 2013.

Jeruk kinow Pakistan bakal hujani pasar Indonesia, dari

<<http://mediaprofesi.com/ekonomi/1092-jeruk-kinow-asal-pakistan-bakal-hujani-pasar-buah-indonesia.html>> diakses pada tanggal 19 September 2013.

Potensi perdagangan D-8, dari <<http://wartaekonomi.co.id/berita6428/gali-potensi-perdagangan-d8.html>> diakses pada tanggal 10 Juli 2013.

RI dongkrak jualan ke Pakistan, dari

<<http://jaringnews.com/ekonomi/umum/9292/kini-saat-ri-dongkrak-jualan-ke-pakistan>> , di akses pada tanggal 26 Maret 2013.

Website:

Buletin Kerjasama Perdagangan Indonesia Pakistan, dari

<http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buletin%202010/Buletin%20Edisi%20003_2010.pdf> diakses pada tanggal 20 Agustus 2013.

GSP UE dan Manfaatnya Bagi Indonesia. <http://www.indonesianmission-eu.org/website/page309696063200309054484127.asp>., diakses tanggal 31 Maret 2013.

- International Trade Center, *Trade Map*, dari
<http://www.trademap.org/index.aspx?ReturnUrl=%2fCountry_SelProductCountry.aspx> pada tanggal 4 Desember 2013.
- Jakarta Pakistan sepakat turunkan cpo, dari
<<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2011/09/19/jakarta-pakistan-sepakat-turunkan-tarif-bea-masuk-impor-cpo-indonesia-id1-1353754108.pdf>> diakses pada tanggal 10 Juli 2013.
- PTA RI Pakistan. <<http://www.bisnis.com/m/pta-ri-pakistan-masih-minim-pemanfaatan-surat-keterangan-asal>> diakses pada tanggal 22 April 2013.
- Visi Indonesia 2020, diunduh dari
<http://www.bappenas.go.id/files/3413/5228/2960/visi2002__20090929140041__2080__11.pdf>, pada tanggal 31 Maret 2013.
- Wayan R. Susila, *Peluang Investasi pada Rehabilitasi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*, dari
<<http://agrimedia.mb.ipb.ac.id/archive/viewAbstrakArchive?id=c6f737bccf91a2aecb90fa40708aad9b>> diakses pada tanggal 4 Desember 2013.